

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Asmuni. (2017). *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press.
- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmoredjo, S. (2019). *Hukum Di Tahun Politik*. Yogyakarta: Dialektika.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CVBudi Utama.
- Baro, a. (2016). *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Christiawan, R. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: ajawali Pers.
- HS, S. (2017). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. E. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA.
- Marbun. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mawardi, I. (2016). *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Monteiro, J. M. (2021). *Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.

Muhammad, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Nasution. (2006) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nursadi, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara Sektor Edisi Revisi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Philipus M. Hadjon, d. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Poernomo, A. E. (2019). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, S. F. (2019). *Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan*. Jakarta: Penerbit Gatra Pustaka.

Soekanto Soerjono, S. M. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudrajat, J. R. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.

Taufani, S. d. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*.

Tjandra, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Artikel Jurnal**

- Herman dan Hendry Julian Noor, D. T. (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). *Jurnal Komunikasi hukum*, 92.
- Putra, H. P. (2020). Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, 37-38.
- Repi, S. E. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Sah atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking). *Jurnal Lex Crime*, 53.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Putra, W. (2015). *Konsistensi Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Pemegang Saham dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

### **Internet**

- Detikfinacne. (2022, Oktober). Diakses Oktober 27, 2022, dari <https://finance.detik.com/energi/d-6312740/sempat-dicabut-ratusan-izin-tambang-bermasalah-dipulihkan-lagi>.
- Kementerian ESDM. (n.d.). *Profil, Tugas, dan Fungsi Kementerian ESDM*. Diakses Oktober 17, 2022, dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, “BKPM Telah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan”, <https://beacukai.bisnis.com/view/20220425/1527011/bkpm-telah-mencabut-1118-izin-usaha-pertambangan>, diakses 26 April 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Ditetapkan Di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 2022)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1629)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220)

Bupati Dharmasraya, Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/226/KPTS – BUP/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Penambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV X Dareh (tanggal 2 Juli 2012)

Pemerintah Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor 20220423-01-18123 tentang Pencabutan Izin, tanggal 23 April 2022.

### **Putusan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN-JKT, diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (diputuskan pada Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022)

### **Kamus**

KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Offline, diakses tanggal 6 Oktober 2020]

### **Lainnya**

CV X Dareh. (2021). Dokumen Rencana Kerja Masa Perpanjangan IUP Operasi Produksi. Pulau Punjung, Dharmasraya Sumatera Barat.

CV X Dareh. (2022). Surat Keberatan. Sungai Dareh, Dharmasraya, Sumatera Barat.